

PERAN AKTOR DALAM PENGELOLAAN GOA JLAMPRONG SEBAGAI DAYA TARIK DESA WISATA MOJO DI NGEPOSARI SEMANU GUNUNGKIDUL

ROLE OF ACTORS IN MANAGING GOA JLAMPRONG AS A VILLAGE ATTRACTION OF MOJO TOURISM IN NGEPOSARI SEMANU GUNUNGKIDUL

Oleh: Yusuf Surya Novanda, Universitas Negeri Yogyakarta
yusufsurya25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan peran antar aktor dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong, dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata Goa Jlamprong Desa Wisata Mojo Kabupaten Gunungkidul. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Industri dan Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala bagian Kesejahteraan Sosial Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Ngeposari Kabupaten Gunungkidul, Pengelola Desa Wisata Mojo, Pedagang serta Penduduk Dukuh Mojo, dan pengunjung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan peran antar aktor sebagai *key player* adalah pihak dinas pariwisata dan pihak pengembang atau swasta, sebagai *context setters* adalah pihak masyarakat, sebagai *subject* adalah pihak pemerintah desa, dan sebagai *crowd* adalah pihak pemerintah kecamatan; dan hambatan yang dihadapi adalah lahan parkir sempit, aksesibilitas kurang, belum ada *homestay*, kurangnya penunjuk arah, kurang pemasaran dalam bentuk promosi, masyarakat Mojo lebih fokus sebagai pengrajin, rendahnya minat wisatawan, dan anggaran.

Kata Kunci: peran aktor, goa jlamprong, dan desa wisata mojo

Abstract

This study aims to determine the level of involvement of roles between actors and obstacles faced of managing Goa Jlamprong Tourism Objects, and find out the obstacles faced in Goa Jlamprong tourism for Mojo Tourism Gunungkidul Regency. The research use a qualitative descriptive. The informants of the study were the Head of Institutional Section for Industrial and Institutional Affairs at the Gunungkidul District Tourism Office, Head of the Social Welfare Section of Semanu District, Gunungkidul District, Ngeposari Village Head, Gunungkidul Regency, Mojo Tourism Village Manager, Mojo Hamlet Traders and Residents, and visitors. The technique of collecting data uses observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the level of involvement of roles between actors as key players is the tourism department and the developer or the private sector, as context setters are the community, as the subject is the village government, and as the crowd is the district government; and obstacles are narrow parking lots, less accessibility, no homestay, lack of directions, less marketing in the form of promotion, Mojo people are more focused as craftsmen, low interest in tourists, and budget.

Keywords: the role of actors, Goa Jampamong, and Desa Wisata Mojo

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang mempunyai potensi wisata berupa penggabungan keempat unsur tersebut di atas. Perkembangan Desa Wisata di DIY tersebar disetiap kabupaten yang ada. Di Kabupaten Gunungkidul, tercatat ada 14 Desa Wisata yang telah berkembang dengan baik. Semua desa wisata tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat program PNPM sektor pariwisata. Desa Wisata Mojo merupakan destinasi wisata pedesaan yang asri, terletak di Dusun Mojo, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Desa ini menyajikan beragam objek wisata sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

Objek wisata yang ditawarkan kepada wisatawan dari Desa Wisata Mojo yaitu paket wisata berupa sumber mata air Kecemut, embung Jlamprong, kerajinan batu ukir, dan aneka kesenian tradisional seperti karawitan, jathilan, reog, kethoprak, serta wayang kulit. Embung Jlamprong merupakan destinasi baru di Desa Wisata Mojo, embung ini dibangun pada tahun 2015 dan baru selesai pada tahun 2016. Desa Wisata Mojo memiliki wisata minat khusus yakni Goa Jlamprong yang menghubungkan dua goa yaitu Goa Sinden dan Goa Gesing. Destinasi wisata minat khusus ini menyajikan *caving* atau susur goa dengan panjang lorong mencapai 500 meter. Adapun Goa jlamprong mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa,

serta masyarakat sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Peran dari setiap pemangku kepentingan (aktor) dalam pengelolaan sebuah objek wisata memiliki fungsi masing-masing. Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan. Pihak swasta atau pelaku usaha pariwisata dengan sumber daya, modal, dan jejaring yang dimilikinya menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan. Masyarakat dengan potensi yang dimiliki, berupa alam, adat, tradisi, dan budaya berperan sebagai tuan rumah sekaligus memiliki peran penting dalam pengembangan potensi kepariwisataan didaerahnya.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Weiring dalam buku Bambang Sunaryo (2013: 218) masyarakat lokal memiliki kedudukan sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (aktor) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan swasta. Masyarakat memiliki fungsi dan peran sebagai tuan rumah, sekaligus sebagai subjek pembangunan yang turut aktif dalam memberikan peran dan kontribusinya dalam pembuatan keputusan dalam pembangunan kepariwisataan.

Peran instansi pemerintah dalam hal pengembangan objek wisata Goa Jlamprong

merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyedia fasilitas bagi pengelola dalam pengembangan objek wisata di Goa Jlamprong. Pemerintah pula memberikan pembekalan pelatihan serta anggaran keuangan melalui dinas pariwisata sesuai dengan program terkait pengembangan potensi sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Dinas pariwisata yang dibantu oleh pemerintah desa terkait bertanggungjawab dalam peningkatan serta pengembangan objek wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik wisata serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Goa Jlamprong terbagi menjadi 2 yaitu dari pengelolaan Desa Wisata Mojo dan komunitas kelompok sadar wisata (POKDARWIS) Desa Ngeposari untuk mengambil keputusan dalam pembangunan kepariwisataan maupun manfaat yang diterima sebagai implikasi berlangsungnya aktivitas wisata di kawasan pedesaan. Hingga akhirnya pembangunan yang melibatkan masyarakat secara utuh ini dapat memberikan peluang sebagai sumber ekonomi yang didapat.

Pokdarwis Desa Wisata Mojo dibentuk pertama kali pada perancangan pengusulan Desa Wisata Mojo pada tahun 2009. Pembentukan Pokdarwis pertama kali dilakukan oleh kepala desa yang sebelumnya menjabat, kepengurusan terbentuk dari pergabungan empat dusun disekitar Desa

Wisata Mojo yaitu Dusun Mojo, Dusun Ngaglik, Dusun Semuluh Lor, dan Dusun Semuluh Kidul. Selanjutnya pembaruan kepengurusan dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2016 dibentuk kembali Pokdarwis Desa dengan terdiri dari gabungan seluruh dusun Desa Ngeposari yang memiliki potensi pariwisata, tidak lagi berfokus pada Desa Wisata Mojo.

Menurut pengelola, kepengurusan Pokdarwis Desa dalam perjalanannya belum maksimal sehingga timbul permasalahan dalam meningkatkan konsep pengembangan Goa Jlamprong kedepan. Masalah yang ditimbulkan antara Pokdarwis Desa dengan Pengelola objek wisata Goa Jlamprong masih terjadi kesalahpahaman antar kedua pihak dalam koordinasi dengan Pokdarwis Desa, belum ada koordinasi untuk membahas objek wisata Goa Jlamprong kedepannya (Hasil wawancara pengelola Goa Jlamprong di Desa Mojo).

Permasalahan lain dari pengelola itu sendiri pun ditemui dalam kepengurusan Goa Jlamprong. Menurut Bapak Wawan sebagai pengelola Goa Jlamprong, Pengelola atau kelompok masyarakat penggali potensi objek wisata Goa Jlamprong di Desa Wisata Mojo terbentuk sejak 2005. Pengelola itu sendiri terdiri dari penggabungan keempat dusun yaitu dusun Semuluh Lor, Semuluh Kidul, Ngaglik, dan Mojo yang memulai dalam pembentukan Desa Wisata Mojo. Sejak tahun 2005 hingga sekarang belum dilakukannya

perubahan struktur kepengurusan secara maksimal untuk pengembangan Desa Wisata Mojo. Dampak yang terjadi mengakibatkan tidak maksimalnya beberapa peran individu dalam pengelolaan Goa Jlamprong (Hasil wawancara pengelola di Desa Mojo).

Permasalahan di atas diperkuat oleh penjelasan dari pengelola Goa Jlamprong bahwa ketika menerima tamu untuk bermalam masih kurang maksimal, karena belum ada penginapan serta dalam memandu wisatawan masih kurang maksimal pula, dikarenakan perlengkapan yang belum memadai untuk menerima tamu dalam jumlah yang banyak (wawancara dengan bapak wawan di Desa Mojo).

Permasalahan fasilitas belum terlengkapi sebagai penunjang potensi alam dapat mengakibatkan pada penilaian wisatawan rendah serta penilain pada kesiapan pengelola dalam mengelola Goa Jlamprong. Dampak lainnya menimbulkan penurunan daya tarik pengunjung untuk berwisata di objek wisata Goa Jlamprong dikarenakan fasilitas yang belum memadai untuk bermalam dan berwisata dalam skala besar.

Dari berbagai permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan bahwa belum sinerginya setiap *stakeholder* untuk mengembangkan potensi Goa Jlamprong sebagai daya tarik wisata Desa Wisata Mojo. Pemetaan peran setiap aktor untuk mengetahui peran dari setiap aktor

berdasarkan kepentingan serta pengaruh dari permasalahan setiap aktor perlu dilakukan agar menemukan solusi dalam pengelolaan Goa Jlamprong serta dapat memaksimalkan potensi didalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat keterlibatan peran antar aktor dalam rangka pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong, dan (2) mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Nggeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Moleong, 2014: 6).

Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni tahun 2016. Lokasi penelitian berada di salah satu universitas swasta di kota Surakarta.

Subjek dan Objek Penelitian

Informan penelitian adalah Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Industri dan Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala bagian Kesejahteraan Sosial Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Ngeposari Kabupaten Gunungkidul, Pengelola Desa Wisata Mojo, Pedagang serta Penduduk Dukuh Mojo, dan pengunjung. Objek penelitian tentang peran antar aktor dalam upaya mewujudkan pengelolaan Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk mendapatkan data yang bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya. Analisis data menggunakan analisis interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis data penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Keterlibatan Para Aktor atau Stakeholders dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika tingkat keterlibatan *key player* peran

aktor dalam rangka pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik wisata Desa Wisata Mojo adalah pihak dinas pariwisata dan pihak pengembang atau swasta. Pada tingkat keterlibatan *context setters* peran aktor dalam rangka pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik wisata Desa Wisata Mojo adalah pihak masyarakat. Pada tingkat keterlibatan *subject* peran aktor dalam rangka pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik wisata Desa Wisata Mojo adalah pihak desa. Pada tingkat keterlibatan *crowd* peran aktor dalam rangka pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik wisata Desa Wisata Mojo adalah pihak desa.

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebabkan adanya pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada satuan tingkat daerah. Begitu pula dengan bidang pariwisata, organisasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pariwisata adalah suatu ilmu yang memiliki dan memenuhi karakteristik sebagai suatu ilmu. Dalam kaitannya dengan pariwisata sebagai ilmu, dapat pula dilihat dari dua sudut pandang objek yaitu; sudut pandang terhadap sesuatu (objek formal) dan substansi material (objek materi).

Kajian ilmu pariwisata dapat dipandang dari objek materinya yaitu; wisatawan dan objek wisata. Kedua objek pokok dari pariwisata ini berkaitan dan berhubungan erat

satu dengan yang lainnya. Secara lengkap dapat digambarkan bahwa ilmu pariwisata terdiri dari empat objek yaitu; wisatawan, objek wisata, pelayanan wisata, dan interaksi antara wisatawan dengan lingkungan objek wisata. Interaksi antara wisatawan, objek wisata dan pelayanan merupakan objek formal dari ilmu pariwisata. Adapun pembahasannya sebagai berikut.

Key Players

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika tingkat keterlibatan *key player* peran aktor dalam rangka pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik wisata Desa Wisata Mojo adalah pihak dinas pariwisata dan pihak pengembang atau swasta.

Pihak Dinas Pariwisata

Peran pemerintah daerah dalam penelitian ini termasuk pada tingkat keterlibatan *key player*. Peran dinas pariwisata sebagai aktor pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan objek wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul diantaranya yaitu sebagai fasilitator dalam bentuk pendanaan untuk penunjang kegiatan pariwisata, pendukung atau pembinaan dalam pengembangan pariwisata, pengawasan dalam setiap kegiatan pariwisata, dan penyedia fasilitas dalam bentuk pelatihan, kegiatan promosi bersama, usaha wisata, dan kampanye sadar wisata. Jika ditinjau dari pemetaan peran,

maka *Key player* yaitu pemangku kepentingan yang paling aktif didalam keterlibatannya. Karena pada kategori ini para pemangku kepentingan memiliki kepentingan serta pengaruh yang besar. Pariwisata merupakan sektor penting dalam peningkatan pendapatan nasional maupun daerah.

Peranan pemerintah dalam pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Obyek wisata ini harus lebih diperhatikan oleh dinas pariwisata sehingga tempat obyek wisata Goa Jlamprong layak untuk dikunjungi. Maka disini peran dinas pariwisata yang lebih berperan untuk mengatasi permasalahan di Goa Jlamprong ini sehingga obyek wisata ini lebih dikenal oleh wisatawan yang mana akan menambah anggaran belanja daerah guna untuk kemajuan daerah tersebut. Tetapi disini peran dinas pariwisata kurang memperhatikan obyek wisata Goa Jlamprong jika dikelola dengan benar maka obyek wisata ini akan lebih maju dan berkembang dalam kemajuan wisata alam dan budaya.

Peran dinas pariwisata yang terpenting untuk mewujudkan pariwisata yang baru ditemukan ini yang penting untuk membangun obyek wisata Goa Jlamprong

yang harus dikenali oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Ngeposari, karena banyak obyek wisata yang ada di Ngeposari yang berkembang maka untuk obyek wisata yang baru ini peran dinas pariwisata yang harus lebih giat dalam mempromosikan obyek wisata Goa Jlamprong tersebut karenanya akan lebih bermanfaat untuk kedepannya, kemajuan di daerah tersebut yang biasa tidak dikenali dengan adanya obyek wisata akan berguna membangun daerah dan memperkenalkan daerah yang ada di Ngeposari sehingga daerah tersebut bisa mandiri akan membangun daerah karena sudah membantu pendapatan belanja daerah tersebut khususnya di daerah obyek wisata Goa Jlamprong yang terletak di Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

Pengembang atau Swasta

Peran pengembang atau swasta dalam penelitian ini termasuk pada tingkat keterlibatan *Key player*. Peran pengembang/swasta dalam pengelolaan objek wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul adalah berusaha berinovasi dan berkreasi menambah wahana maupun memperbaiki sarana-prasarana pendukung yang belum ada di Goa Jlamprong diantaranya adalah perbaikan jalan utama, memperbaiki gardu

pandang, membuat gazebo-gazebo yang lebih layak dan modern, dan memberikan modal bagi warga sekitar dalam rangka penyediaan warung makan, tempat penginapan, dan hal-hal dalam ketersediaan fasilitas yang dapat dijadikan sebagai salah satu peningkatan ekonomi masyarakat desa wisata.

Peran swasta merupakan pilar utama dalam pengembangan pariwisata selain masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan pariwisata yang diiringi dengan kebijakannya, kemudian pihak swasta yang secara profesional menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan pariwisata tersebut, maka tugas masyarakat adalah mendukung dalam berbagai program pariwisata yang telah direncanakan oleh pemerintah dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya tarik sektor pariwisata.

Menurut Sulistyani (2004: 129) kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau komponen”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa

saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Context Setters

Peran masyarakat dalam penelitian ini termasuk pada tingkat keterlibatan *Context setters*. *Context setters*, yaitu para pemangku kepentingan yang sangat aktif dalam mempengaruhi, relatif pasif, dan dapat berubah menjadi *key players* karena suatu peristiwa. Peran masyarakat sebagai aktor dalam mewujudkan pengelolaan objek wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul diantaranya yaitu masyarakat bersedia mengikuti program POKDARWIS yang diadakan oleh pengelola, selain itu juga masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya pemasaran secara langsung (mulut-kemulut), dan menjadi pemandu wisata bagi pengunjung dalam melakukan susur goa.

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. oleh karena itu sektor pariwisata harus dirawat dan dijaga keberadaannya. Dan sektor pariwisata juga merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Memasuki abad sekarang perhatian terhadap pariwisata sudah sangat meluas, hal ini terjadi karena pariwisata mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi

masyarakat setempat yang menerima kedatangan wisatawan

Menurut Isbandi (2007: 27) Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dapat diukur secara nyata dalam aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah digariskan didalam kegiatan fisik. Dengan demikian ukurannya adalah bagaimana masyarakat memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, material (barang) dan juga tenaga. Dan sumbangan tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan secara ketiganya.

Tujuan dari peran masyarakat untuk menghasilkan ide dan persepsi yang berguna untuk masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Santoso, 1990) sebab dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak dari kegiatan dari cara mengambil keputusan, kebutuhan dari pengharapan kelompok masyarakat, dan kelompok masyarakat itu menuangkannya dalam suatu konsep. Reaksi dari pandangan

masyarakat saja akan membantu masyarakat itu sendiri dalam hal pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas, arah dan kepentingan yang positif dari berbagai faktor.

Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013: 215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menguatkan *power* (daya) atau *empowering* dari golongan masyarakat yang *powerless* (tidak berdaya), biasanya mereka yang sedang tergolong ke dalam masyarakat yang marjinal.

Sinclair (1998) menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa devisa, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha dalam pariwisata seperti usaha akomodasi, transportasi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian lokal, regional, maupun nasional.

Dengan adanya peran masyarakat dalam berbagai pelaksanaan pengelolaan Goa Jlamprong tentu hasil yang akan di capai akan lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan

Goa Jlamprong yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya dukungan masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui kondisi daerah mereka serta lebih menguasai apa yang dibutuhkan dan menjadi permasalahan bagi mereka sendiri.

Pengelolaan Goa Jlambrong yang direncanakan oleh pemerintah tanpa adanya masukan dari masyarakat biasanya akan banyak mengalami kesulitan dan akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut biasanya akan berakibat terhadap kegagalan dalam pengelolaan Goa Jlamprong sebagai desa wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

Subject

Peran pemerintah desa dalam penelitian ini termasuk pada tingkat keterlibatan *Subject*, yaitu mereka yang memiliki kepentingan yang besar, tetapi tidak memiliki cukup *power* untuk bisa mempengaruhi. Peran pemerintah desa sebagai aktor dalam mewujudkan pengelolaan objek wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul diantaranya yaitu membangun infrastruktur termasuk perlengkapan sarana dan prasarana wisata, mensosialisaikan kepada warga supaya menjadi tuan rumah yang baik, bekerja sama dengan *stakeholder*, melakukan promosi melalui website pemerintah, membentuk POKDARWIS, mengadakan pelatihan buat

warga binaan, dan melakukan perbaikan serta evaluasi secara berkala demi kemajuan daerah wisata.

Menurut Haryono, Fauzi, dan Imam (2015), arti dari peran ialah sebuah bentuk terjemahan dari sebuah status ke dalam tindakan, sehingga peran berubah menjadi sebuah status, dan kemudian status itu sendiri merupakan sebuah aspek dari peran. Atau dengan kata lain, peran dapat dikatakan sebagai sesuatu bentuk tindakan yang diharapkan oleh seseorang atas status yang dimilikinya.

Teori di atas dapat dijelaskan jika pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemahaman tentang Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa memiliki tugas untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat maka posisi desa memiliki otonomi yang asli.

Crowd

Peran pemerintah kecamatan dalam penelitian ini termasuk pada tingkat keterlibatan *Crowd*, yaitu mereka yang memiliki kepentingan serta pengaruh kecil. Pemangku kepentingan pada tipe ini biasanya mempertimbangkan segala kegiatan yang

mereka lakukan. Peran pemerintah kecamatan sebagai aktor dalam mewujudkan pengelolaan objek wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul diantaranya yaitu melakukan kontroling terhadap pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan pengelolaan objek wisata Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul dengan cara memberikan evaluasi dan usulan-usulan.

Salah satu kecamatan yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi desa. Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah. Pentingnya peran kecamatan itu ditambah adanya tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai.

Adapun tugas yang harus dilaksanakan seperti, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan kegiatan

pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan, pelaksanaan.

Peran pemerintah sangat penting dalam merancang dan menghadapi masalah pembangunan ekonomi. Seberapa jauh peran pemerintah menentukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Peran itu dapat dilihat dari sikap pemerintah dalam menyelesaikannya. Peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi, Pemerintah juga yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancangan pembangunan, apakah sesuai dengan rencana yang di telah dibuat. Peran pemerintah adalah sebagai pengendali.

Hambatan serta Solusi Peran Antar Aktor dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Jlamprong

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hambatan kawasan wisata Goa Jlamprong dalam menarik minat wisatawan diantaranya adalah lahan parkir sempit, aksesibilitasnya kurang, belum ada kesiapan rumah penduduk untuk dialihkan menjadi *homestay*, kurangnya penunjuk arah di sekitar kawasan objek wisata, kurang maksimalnya pemerintah serta pengelola dalam melakukan pemasaran dalam bentuk promosi, masyarakat khususnya Mojo lebih fokus pada kegiatan-kegiatan personal mereka sebagai pengrajin sehingga mengesampingkan untuk memajukan desa wisata, rendahnya minat wisatawan karena Goa Jlamprong kalah

menarik dengan wisata lain di Gunungkidul, dan anggaran.

Pengelolaan pariwisata adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki obyek wisata yang sedang dipasarkan ataupun yang akan dipasarkan. Pengelolaan tersebut meliputi perbaikan obyek dan pelayanan kepada wisatawan semenjak berangkat dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan hingga kembali ke tempat semula. Pada dasarnya pengelolaan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan *matching* dan *adjustment* yang terus menerus antara sisi *supply* dan *demand* kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan. Sedangkan, pengelolaan potensi pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu obyek wisata dengan cara melakukan pembangunan unsur-unsur fisik maupun non fisik dari sistem pariwisata sehingga meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini yang dimaksud produktivitas obyek wisata berupa meningkatnya pendapatan daerah yang diperoleh dari kunjungan wisatawan yang masuk.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang “peran antar aktor dalam upaya mewujudkan pengelolaan Goa Jlamprong sebagai daya tarik Desa Wisata Mojo di Desa Ngeposari, Kecamatan

Semanu, Kabupaten Gunungkidul”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Tingkat keterlibatan peran antar aktor sebagai *key player* adalah pihak dinas pariwisata dan pihak pengembang atau swasta, sebagai *context setters* adalah pihak masyarakat, sebagai *subject* adalah pihak pemerintah desa, dan sebagai *crowd* adalah pihak pemerintah kecamatan.

Hambatannya adalah lahan parkir sempit, aksesibilitas kurang, belum ada *homestay*, kurangnya penunjuk arah, kurang pemasaran dalam bentuk promosi, masyarakat Mojo lebih fokus sebagai pengrajin, rendahnya minat wisatawan, dan anggaran.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut.

Menjalin kerjasama atau program kemitraan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai sektor usaha dalam mengatasi minimnya anggaran dinas yang dimiliki. Di dalam hal ini perlu adanya sinergi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinhubkominpar; Bappeda; KPPT; dan Pihak Ketiga/ Investor.

Memperbaiki dan mengembangkan sarana prasarana/ infrastruktur yang ada memelihara sarana pendukung demi kenyamanan dan keamanan wisatawan atau pengunjung yang datang, meliputi

sarana penginapan, mini market, dan perbaikan jalan sebagai akses utama menuju lokasi wisata.

Pemerintah diharapkan membuka lapangan pekerjaan dalam bentuk usaha yang diprogramkan untuk masyarakat sekitar wisata dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haryono, Sigit, Suharyono, Fauzi Achmad D.H., Imam Suyadi. 2015. The Effects of Service Quality on Customer Satisfaction, Customer Delight, Trust, Repurchase Intention, and Word of Mouth. *European Journal of Business and Management* www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.7, No.12, 2015.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI.
- Moleong. Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Sastropoetro. 1990. *Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sinclair, T.R dan F.P. Gardner. 1998. *Principles of Ecology in Plant Production*. CAB International, Florida.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang *Kesehatan Jiwa*.